

KOMUNIKASI POLITIK ULAMA *DAYAH* TRIDISIONAL ACEH (Studi Ulama Kabupaten Bireuen Dalam Menghadapi Pilkada 2019)

Yusfriadi, S.Sos.I., MA

Dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi IAI Al-Aziziyah

(Email: yusfriadi@iaialaziziyah.ac.id)

ABSTRAK

Perjalanan politik ulama *dayah* tradisional Aceh dalam dua pemilu tahun 2009 dan 2014 tidak berhasil meraih dukungan masyarakat yang umumnya sangat fanatik ulama dalam segala aspek kehidupan. Tentunya berhubungan erat dengan komunikasi politik yang digunakan. Dari itu menjadi sangat menarik mengkaji tentang etika komunikasi politik ulama *dayah* tradisional Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis etika komunikasi politik ulama *dayah* tradisional Aceh di Kabupaten Bireuen dalam menghadapi pilkada 2019. Adapun pendekatan yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara secara mendalam terhadap informan yang dipilih secara *purposive*. Sebagai sumber datanya adalah ulama *dayah* tradisional yang terlibat dalam bidang politik, terutama terlibat dalam politik praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa etika komunikasi politik ulama *dayah* tradisional Aceh di kabupaten bireuen memiliki dua sisi baik dan buruk, yaitu di pandang baik karena komunikasi politik dilakukan dengan mengajak dan mencontohkan praktek politik yang sarat dengan nilai-nilai syari'at dalam rangka memperbaiki iklim politik sekaligus mampu mempertahankan status keulamaanya dan juga di anggap tidak baik oleh sebagian masyarakat akibat dari penggunaan materi agama yang memunculkan kesan memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknya.

Kata Kunci : *Etika, Komunikasi, Politik, Ulama, Dayah.*

A. Pendahuluan

Komunikasi akan terus bergulir seiring adanya kehidupan manusia, tema-tema yang membicarakan tentang komunikasi kian berkembang tumbuh menjadi embrio kajian yang tidak akan pernah menemukan garis finishnya. Hal ini karena adanya saling keterikatan yang tidak dapat dipisahkan antara komunikasi dan kehidupan manusia. Karenanya, merupakan suatu keniscayaan jika sebagian orang berprinsip bahwa mesti berkomunikasi untuk terus mempertahankan hidup dan bukan hal yang aneh jika banyak orang yang menghabiskan hidupnya untuk berkiprah dalam dunia komunikasi. Singkatnya, sebagian mereka berkomunikasi untuk hidup dan sebagiannya lagi hidup untuk berkomunikasi.

Tidak terkecuali komunikasi politik, selama peran politik masih terus dimainkan dalam kehidupan manusia, isu-isu komunikasi dalam bidang ini juga tidak akan pernah habis dijadikan kajian, mengikuti dinamika politik yang berlaku. Keterkaitan antara komunikasi dengan pergulatan politik yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, memposisikan komunikasi politik sebagai persoalan yang sangat penting dalam pandangan para ahli dan praktisi dalam bidang politik. Mengutip sebuah pernyataan bahwa “jika ingin menguasai dunia, maka kuasailah informasi”.¹ Ini jelas menggambarkan eksistensi komunikasi dalam perjalanan politik.

Di Indonesia umumnya, sistem politik dapat dibedakan dalam beberapa periode, yaitu politik pemerintahan era orde lama, orde baru dan era reformasi. Masing-masing era tersebut memiliki perbedaan dan keunikan tersendiri dalam menjalankan strategi politiknya. Demikian

¹Aji Sularso, *Profesionalisme Humas dalam Menghadapi Tantangan*, Komunikasi, Vol. 9, No. 2, LIPI Press, 2006, hlm. 31.

pula di Aceh secara khusus, di samping mendapat pengaruh kuat dari kebijakan politik pemerintahan Indonesia, juga memiliki karakter politik sendiri yang membedakan provinsi ini dengan provinsi lainnya. Sejarah “hitam” dari konflik daerah yang lahir atas dasar tuntutan keadilan dari setiap kebijakan pemerintah pusat, akhirnya ditempuh melalui penandatanganan nota kesepakatan perdamaian (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki.²

Perjalanan politik tidaklah sesederhana gambaran di atas, melainkan peristiwa yang sangat rumit dan kompleks yang berdampak kepada seluruh aspek kehidupan, sosial, budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, agama, dan lain sebagainya. Di sana juga turut melibatkan seluruh lapisan masyarakat, mulai masyarakat awam,

²Sejak pemerintahan Soekarno memangkas otoritas politik pemerintahan lokal di Aceh yang melahirkan perlawanan ulama-ulama Aceh di bawah kepemimpinan Teungku Daud Beureu'eh, berlanjut pada pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Soeharto yang memaknai Aceh sebagai sebuah sumber ekonomi yang besar serta menempatkannya dalam narasi pembangunan yang berfondasikan pada pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik, hal ini menciptakan perubahan tatanan politik dan ekonomi di wilayah Aceh.

Untuk menjaga berlangsungnya proses eksploitasi ekonomi ini, Orde Baru menempatkan militer sebagai penjaga stabilitas ekonomi-politik, serta memangkas otoritas pemerintah lokal. Sentralisasi kekuasaan dan absennya otoritas wilayah ini yang kemudian menjadi alasan lahirnya perlawanan dari sekelompok masyarakat yang menamakan dirinya Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di bawah kepemimpinan Hasan di Tiro pada tahun 1976 dengan ide dasar untuk memerdekakan dan memisahkan Aceh dari Republik Indonesia. Antisipasi pemerintahan Soeharto, pada tahun 1989 melakukan operasi militer, yang berkembang dengan penetapan dan penerapan status Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh Selama sembilan tahun (1989-1998), selanjutnya beberapa operasi militer seperti Operasi Sadar Wibawa, Operasi Sadar Rencong I, II, III, Operasi Meunasah, Operasi Pemulihan Keamanan, seperti Peristiwa Idi Cut (Aceh Timur), Tragedi Beutong Ateuh (Tengku Bantaqiah), Tragedi Simpang KKA, Peristiwa Gedung KNPI, dan lain-lain. Lihat: Daniel Hutagalung, *Problem Aceh: Menutup Aib dengan Darurat Militer*, dalam Elsam, Vol. II, No. VII, 2003, hlm. 1-4.

intelektual/cendikiawan hingga para ulama, masyarakat miskin sampai masyarakat kaya, masyarakat biasa hingga para pejabat, dan seterusnya.³

Salah satu *icon* politik di Aceh (Serambi Mekkah) adalah ulama, di mana dalam pandangan masyarakat Aceh mereka lebih dikenal dengan sebutan ulama dayah. Para ulama, di samping fokus pada penyebaran nilai-nilai agama, juga pro-aktif dalam merespon berbagai isu politik pada masanya melalui lembaga pendidikan yang mereka kelola, yakni dayah. Keterlibatan ulama dalam dunia politik telah memberi kontribusi signifikan dalam segala aspek kehidupan masyarakat Aceh.

Ahmad menggambarkan bahwa para ulama mesti melanjutkan risalah yang sebelumnya adalah tugas Nabi.⁴ Dasar pandangan ini merujuk pada Hadits riwayat al-Bukhari dan Ibn Majah yang menjelaskan:

³Era baru perjalanan sejarah, berawal dari kejadian bencana dahsyat gempa bumi berkekuatan 9 Skala Richter disusul dengan tsunami yang telah meluluhlantakkan bumi serambi mekkah. Salah satu sumber mencatat bahwa sekitar 230.000 jiwa meninggal dunia, 36.786 hilang, dan 174.000 jiwa tinggal di tenda-tenda pengungsian. Setelah melewati beberapa kali dialog RI-GAM di Helsinki yang difasilitasi oleh Yayasan Crisis Management Initiative (CMI) merupakan peletakan awal kehidupan baru politik Aceh yang ditandai dengan Memorandum of Understanding (MoU) Indonesia-GAM pada tanggal 2 Januari 2005 lalu, berikut dipantau implementasinya oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) yang beranggotakan lima negara ASEAN dan UNI Eropa. Di antara poin penting adalah bahwa pemerintah Indonesia akan turut memfasilitasi pembentukan partai politik lokal di Aceh dan pemberian amnesti bagi GAM. Lihat: Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008), hlm. 170-176

⁴Ahmad al-Imrani, *Majalah Al-Bayan*, Juz.205, (Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar Versi 3.8, 2009), hlm.6.

أن العلماء ورثة الأنبياء ورثوا العلم ومن أخذهُ أخذ بحظ وافر (رواه البخاري و ابن ماجه⁵)

Artinya: “*Sesungguhnya para ulama adalah pewaris para nabi, mereka mewarisi ilmu. Barang siapa mengambilnya, ia telah mengambil keuntungan yang banyak*”. (H.R. al-Bukhari dan Ibn Majah)

Seorang yang alim (ulama), berkewajiban menjelaskan bagi ummat tentang perkara yang halal dan haram serta membedakan yang buruk dari yang baik,⁶ termasuk perkara politik. Ulama dayah memang pernah memberi pengaruh yang luas dalam struktur sosial masyarakat Aceh sebagaimana diperlihatkan oleh sejumlah ulama karismatik di masa lalu dan hari ini.

Di Aceh, pasca penandatanganan MoU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia (RI) dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), beberapa ulama dayah Aceh merespon fenomena politik dengan beberapa agenda. Sebagian ulama dayah yang pada masa-masa sebelumnya sudah terikat dengan Partai Politik Nasional kembali memperkuat hubungan politik mereka semula.

Ada juga sebahagian yang lainnya, dalam menghadapi pemilu 2009-2014, dengan mendirikan partai politik lokal sendiri yang diberi nama dengan PDA (Partai Daulat Aceh). Dari hasil perolehan suara pada pemilu tersebut, partai ini tidak memenuhi persyaratan untuk kembali bertanding pada pemilu berikutnya yang disebut dengan degradasi. Akibatnya, pada pemilu periode 2014-2019 diganti dengan Partai Damai Aceh yang juga di singkat dengan PDA. Sementara itu, sebahagian yang lainnya bergabung dengan mantan pejuang Gerakan

⁵Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz 1*, (Software al-Maktabah Al-Syamilah Ishtar Versi 3.8, 2009), hlm. 119. (Lihat juga: Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz. 1*, (Software al-Maktabah Al-Syamilah Ishtar Versi 3.8, 2009), hlm. 259.)

⁶Ahmad al-‘Imrani, *Majalah Al-Bayan, Juz.205*, hlm.6.

Aceh Merdeka yang mendirikan partai politik PA (Partai Aceh). Mereka sama-sama memperjuangkan partai ini dan hingga sekarang ini masih mendominasi suasana politik di Aceh.

Selain dari itu, ada juga upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh ulama dayah sebagai langkah untuk mengekspresikan peranan politik mereka. Peran politik ulama dayah dalam merespon isu-isu politik terlihat dengan munculnya Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) pasca era reformasi yang agenda utamanya adalah memberi dukungan terhadap wacana pelaksanaan referendum di Aceh. Selanjutnya, pasca penandatanganan nota kesepakatan perdamaian (MoU) antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki digunakan oleh sebagian ulama dayah untuk mengekspresikan peran-peran sosial politik mereka. Walaupun Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA) terbentuk atas dasar memperkokoh silaturahmi antar ulama Aceh dalam rangka membina/membentuk ummat manusia yang sesuai dengan ajaran Islam melalui pengembangan kegiatan-kegiatan yang Islami demi mencapai ridha Allah SWT,⁷ namun implementasinya tidak mungkin melepaskan diri dari keterlibatannya dalam politik pula, secara langsung maupun tidak langsung.

Mengamati perjalanan politik ulama dayah yang terkait dengan dimensi kebijakan politik dari daerah maupun nasional, menjadi menarik ketika menelusuri peran politik ulama dayah dalam mempertahankan partai politik. Sebagaimana digambarkan sebelumnya bahwa partai lokal yang didirikan ulama dayah tidak berhasil meraih dukungan masyarakat pada dua periode pelaksanaan pemilu, yakni periode 2009-2014 dan periode 2014-2019. Kekalahan ini menyebabkan partai ulama mengalami degradasi, tidak memenuhi persyaratan untuk

⁷Lihat AD/ART Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA)

dapat kembali ikut dalam pemilu berikutnya dan akhirnya terpaksa harus dileburkan.⁸

Idealnya, ulama dayah mendapat dukungan penuh dari masyarakat, karena umumnya masyarakat Aceh yang *notabene*-nya mayoritas muslim, mempertempatkan ulama dayah sebagai panutan dalam segala aspek kehidupan. Demikian pula dalam bidang politik, sudah semestinya masyarakat memberi dukungan terhadap ulama dayah yang berperan di dalamnya. Di antara indikatornya bahwa masyarakat tidak mendukung politik ulama dayah terlihat dari hasil perolehan suara partai yang diusung ulama pada pemilu.

Beranjak dari fenomena di atas, memunculkan berbagai macam persoalan. Jelasnya, ketika masyarakat mengambil sikap untuk tidak memberikan dukungannya kepada ulama dayah dalam bidang politik, sedang ulama dayah merupakan panutan mereka. Tentu berbagai faktor ikut terlibat di dalamnya. Tak terkecuali faktor komunikasi, yakni komunikasi politik ulama ketika memainkan peran politiknya. Asumsi ini didasari atas *statement* bahwa keberhasilan politik sangat tergantung dari komunikasi politik yang digunakan.

Pola komunikasi politik yang berlangsung cenderung mengikuti dinamika politik. Artinya, sistem politik yang dibangun senantiasa mewarnai komunikasi politik. Dalam artikel Alex Sobur yang mengutip pendapat Galnor, menyebutkan bahwa *"Tanpa komunikasi, tidak akan ada usaha bersama, dan dengan demikian tidak ada politik."* Di samping itu pernyataan lain ditemukan dari Pye, bahwa *"... tanpa suatu jaringan (komunikasi) yang mampu memperbesar (enlarging) dan melipatgandakan (magnifying) ucapan-ucapan dan pilihan-pilihan individual, maka di situ tidak*

⁸Laporan KIP Tahun 2009 dan Laporan KIP Tahun 2014

*akan ada suatu politik yang dapat merentangkan suatu bangsa.*⁹ Intinya, suatu sistem politik tidak akan terbentuk tanpa adanya komunikasi politik dan saling mempengaruhi.

Sebagaimana telah sama-sama dimaklumi bahwa ulama dayah Aceh menjadi panutan masyarakat karena kemampuannya dalam menguasai pengetahuan keagamaan. Dengan kemampuan tersebut para ulama dayah dipercaya dan diyakini mampu membimbing dan membina masyarakat menuju ke arah yang lebih baik. Ini secara umum menunjukkan keberhasilan ulama dayah dalam membangun komunikasi dengan masyarakat di bidang keagamaan.

Keberhasilan yang sama diharapkan akan diperoleh pula dalam berpolitik. Ulama sebagai bahagian dari rakyat yang juga memiliki peluang sama seperti rakyat lainnya, yaitu berpartisipasi dalam politik bernegara secara substansial maupun politik praktis. Keterlibatan ulama dalam politik juga membutuhkan kemampuan agar tujuan politiknya tercapai. Dengan melibatkan diri dalam ranah politik, menunjukkan bahwa ulama memiliki kepercayaan diri akan kemampuannya secara moril maupun materil.

Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pula komunikasi ulama di bidang politik? Sehingga tidak mampu meraih dukungan dan kepercayaan masyarakat. *Statement* sementara adalah adanya kemungkinan bahwa komunikasi politik yang diterapkan ulama dayah tidak merujuk pada konsep-konsep komunikasi politik, peneliti memandang perlu adanya penelitian tentang: “Etika Komunikasi Politik Ulama Dayah Tradisional Aceh (Studi Ulama Kabupaten Bireuen Dalam Menghadapi Pilkada 2019)”.

⁹Alex Sobur, *Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani* (Makalah Juara ke III, LKTI dosen Unisba Tahun Akademik 1999-2000, tidak diterbitkan), hlm. 122.

B. Etika Komunikasi Politik

1. Pengertian Etika

Istilah etika mungkin saja sering kita dengar dalam pergaulan sehari-hari, apalagi di Indonesia. Seorang anak bila mengatakan kata 'gue' kepada orang tua, guru, atau siapapun yang lebih tua umurnya dan dihormati dianggap tidak ber-etika. Di dunia barat hal ini memang tidak berlaku seperti dalam bahasa Inggris kita berbicara kepada orang tua dengan kata 'I' dan 'you', penggunaan kata 'gue' di etnis Betawi mungkin biasa saja mengucapkannya kepada orang lebih tua karena memang kebiasaan budayanya. Begitu pula bila di dunia politik ada pejabat negara yang mengadakan pertemuan dengan pengusaha secara informal (*illegal*) dan membahas masalah urusan yang berkaitan kepentingan negara tidak sesuai jalurnya bisa juga dikatakan tidak ber-etika politik. Ternyata masalah etika bisa dikatakan masalah pantas atau tidak pantas atau sesuatu itu dilakukan bisa jadi karena melanggar suatu norma-norma budaya, adat istiadat, norma hukum atau suatu kebiasaan yang berlaku umum di masyarakat.

Etika adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan tentang manusia. Etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *Ethos* yang artinya kebiasaan. Etika membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan), tetapi bukan menurut arti tata-adat, melainkan tata-adab, yaitu berdasarkan pada inti atau sifat dasar manusia; baik-buruk.¹⁰ Jadi dengan demikian etika adalah teori tentang perbuatan manusia ditimbang menurut baik-buruknya.¹¹ Etika sebagai cabang ilmu pengetahuan, tidak berdiri sendiri. Sebagai ilmu yang membahas tentang manusia, ia berhubungan dengan seluruh ilmu tentang manusia. Ia bersangkutan paut dengan

¹⁰Austin Fagothey, *Ethics in Theory & Practice, from right & reason*, dalam Mudlor Achmad, Drs, *Etika dalam Islam*, (Al-Ikhlash, Surabaya), hlm. 15

¹¹M.J. Langeveld, Dr; *Menuju ke Pemikiran Filsafat*; terj. G.J.Claessen, (PT. Pembangunan, Jakarta, cet III, 1959), hlm. 185

Antropologi, psikologi, sosiologi, ekonomi, hukum dan juga komunikasi. Namun, perbedaannya terletak pada sudut pandangnya (*point of view*), yaitu baik-buruk. Dalam bahasa percakapan, orang sangat biasa menggunakan kata “baik” sebagai lawan kata “buruk” dalam berbagai hal, misalnya: pedapatnya baik, tulisannya buruk, penghidupan si Rudi baik, tingkah laku si Fulan buruk, dan sebagainya. Terkait pemakaian tersebut sedemikian umumnya, maka agar tidak sampai membawa kesalah-pahaman tentang artinya dalam persoalan etika, perlu difahami bahwa yang dimaksud dengan baik-buruk di sini adalah kebajikan dan pelanggaran dimana lebih mencerminkan nilai ethis.¹²

Bila dikatakan “si Fulan telah berbuat suatu kebajikan” atau sebaliknya, mengandung suatu implikasi bahwa ada hubungan antara nilai “kebajikan” pada perbuatan itu dengan “apa” yang menjadi dasarnya. Diputuskan perbuatan tadi sebagai suatu kebajikan adalah karena ia ternyata terikat oleh sesuatu, di atas mana penilaian itu mendasar. Nilai kebajikan dan perbuatan terikat dengan sesuatu yang berlaku sebagai aturan itulah yang disebut dengan norma. Norma disini menjelma dalam bentuk undang-undang negara, adat istiadat, hukum agama, kode etik suatu lembaga dan sebagainya. Jadi perbuatan si Fulan dikatakan baik, oleh karena ada hubungan persesuaian antara perbuatannya dengan norma etika yang berlaku. Setiap norma atau aturan pada intinya meminta kepada siapa sajayang berada di dalam daerah hukumnya untuk berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan norma yang berlaku. Apabila seseorang bertindak menyalahi ketentuan-ketentuannya, pada dirinya akan dikenakan “sangsi”. Jadi norma itu bersifat memaksa, karena itulah penyesuaian diri

¹²Mudlor Ahmad, *Etika dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, tt), hlm. 16

terhadapnya bersifat “harus”.¹³

Dalam bentuk jamak (ta etha) artinya adat kebiasaan.¹⁴ Tetapi dalam perkembangannya studi ini tidak hanya membahas kebiasaan yang semata-mata yang berdasarkan tata cara (manners), melainkan membahas kebiasaan (adat) yang berdasarkan pada sesuatu yang melekat dalam kodrat manusia (inherent in human nature) yaitu suatu kebiasaan yang terikat pada pengertian baik atau buruk dalam tingkah laku manusia.¹⁵ Secara terminologi etika menurut Franz Magnis Suseno adalah filsafat mengenai bidang moral, etika merupakan ilmu atau refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, norma dan istilah moral. Dalam arti luas sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya menjalankan kehidupannya.¹⁶ Menurut M. Amin Syukur mengutip pendapat Robert C Soimon, etika merupakan disiplin ilmu yang mempelajari nilai-nilai hidup manusia yang sesungguhnya dan hukum tingkah laku. Dengan demikian, menurut Amin Syukur, etika adalah ilmu yang berisi kaidah baik dan buruk suatu perbuatan dan aktivitas.¹⁷ Dalam rangka menjernihkan istilah, perlu juga disimak perbedaan antara etika dengan etiket, etika dengan moral dan akhlak, karena kerap kali istilah-istilah tersebut dicampur adukkan.

a. Etika dan etiket

Etika dengan etiket keduanya memang menyangkut perilaku serta mengatur perilaku manusia secara normatif (memberi norma pada

¹³Mudlor Ahmad, *Etika...*, hlm. 16.

¹⁴K Bertens, *Etika, Cet. 5*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000), hlm. 3

¹⁵Agus Makmurtono dan Munawir, *Etika (Filsafat Moral), Cet. 1*, (Jakarta: Wira Sari, 1989), hlm. 10

¹⁶Franz Magnis Suseno, *Etika dasar, Cet. 6*, (Jakarta: Kanisius, 1993), hlm. 17.

¹⁷M Amin Syukur, *Etika Keilmuan*, Jurnal Theologia, Semarang, Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo,

perilaku manusia dan dengan demikian menyatakan apa yang harus dilakukan atau tidak boleh dilakukan manusia). Perbedaannya adalah etiket menyangkut 'cara' suatu perbuatan harus dilakukan manusia (cara yang tepat) artinya cara yang diharapkan serta ditentukan dalam kalangan tertentu. Sedangkan etika tidak terbatas pada cara melakukan suatu perbuatan, etika memberi norma pada perbuatan itu sendiri, apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak.¹⁸

Selain itu etiket bersifat relatif, sesuatu yang dianggap tidak sopan dalam satu kebudayaan, bisa saja dianggap sopan dalam kebudayaan lain. Sedangkan etika lebih bersifat absolut semisal jangan mencuri, jangan berbohong merupakan prinsip- prinsip etika yang tidak bisa ditawar-tawar.¹⁹

b. Etika dan moral

Menurut Franz Magnis Suseno etika dibedakan dari ajaran moral. Ajaran moral langsung mengajarkan bagaimana orang harus hidup, berupa rumusan sistematis terhadap anggapan-anggapan tentang apa yang bernilai serta kewajiban-kewajiban manusia. Sedangkan etika merupakan ilmu tentang nilai-nilai ajaran moral.dalam pengertian yang sebenarnya berarti filsafat mengenai bidang moral, jadi etika merupakan ilmu bukan sebuah ajaran yaitu refleksi sistematis mengenai pendapat-pendapat, dan istilah-istilah moral. Jadi etika dan ajaran moral tidak berada ditingkat yang sama. Yang mengatakan bagaimana kita harus hidup, bukan etika melainkan ajaran moral.Etika mau mengerti mengapa kita harus mengikuti ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita dapat mengambil sikap yang bertanggung jawab

¹⁸Bertens, *Etika*, hlm. 8

¹⁹*Ibid*, hlm. 9

berhadapan dengan pelbagai ajaran moral.²⁰

c. Etika dan akhlak

Istilah etika dalam Islam disinonimkan dengan perkataan akhlak dalam bentuk jamak khuluq yang berarti adab atau batas antara baik dan buruk, terpuji dan tercela.²¹ Akhlak secara istilah adalah sistem nilai yang mengatur pola sikap dan tindakan manusia di atas bumi. Sistem nilai yang dimaksud adalah ajaran Islam, dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasul sebagai sumber nilainya serta ijtihad sebagai metode berfikirnya.

Imam Ghozali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* mengartikan akhlak yaitu:

*"Khuluk (akhlak) ialah haihat atau sifat yang tertanam dalam jiwa yang dari padanya lahir perbuatan-perbuatan yang dengan musuh dan gampang tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan."*²²

Memperhatikan beberapa uraian di atas, bisa dipahami jika sering terjadi penyamaan arti antara etika dengan etiket, maupun etika dengan moral dan akhlak. Karena antara keempat istilah tersebut meskipun mempunyai perbedaan arti yang cukup mendasar akan tetapi keempat istilah tersebut sama-sama menjadikan "baik dan buruk" perbuatan manusia sebagai obyeknya. Pengertian-pengertian yang telah dijabarkan di atas adalah bersifat teori dan hikmah. Masalah etika atau akhlak bisa dikatakan misi penting dan utama berdasarkan ucapan nabi Muhammad Saw:

قال النبي ص م: إنما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق

"Sesungguhnya aku diutus, (tiada lain, kecuali) supaya

²⁰Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1993), hlm. 31-32

²¹Barmawei Umary, *Materia Akhlak*, Cet. 11, (Solo: Ramadhani, 1993), hlm. 1

²²Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III, (Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Sirkahu, t.t), hlm. 52

menyempurnakan akhlak yang mulia".²³

Hadits ini menunjukkan bahwa tugas dan misi kerasulan adalah menyempurnakan akhlak. Artinya akhlak memang menjadi risalah diutusnya Nabi Muhammad saw, selaku *khotamul anbiya' wal mursalin*; penutup para nabi dan rasul. Menyempurnakan akhlak bisa dikatakan menjadi megaproject yang yang menjadi pertarungan dari segala perjuangan beliau di dunia. Tentu berbicara akhlak haruslah dimulai dari diri sendiri seperti yang telah dicontohkan oleh para Nabi dan Rasul sepanjang sejarah. Akhlak tidak muncul seketika ada proses dalam pembentukannya. Maka menyempurnakan akhlak, tentu saja merupakan tugas berat. Dalam mengemban tugas ini tidak serta merta hanya dengan memerintahkan atau dengan memberi arahan atau himbauan, tapi harus dengan memberikan contoh atau suri tauladan. Akhlak baik perlu ditunjukkan kepada orang lain sehingga menjadi sebuah pesan yang akan ditiru atau menjadi rujukan. Akhlak memang merupakan satu-satunya ukuran dan menjadi garis pemisah; antara mana perbuatan yang baik dan mana yang tidak baik. Artinya, perilaku manusia disebut berkualitas, jika perilaku tersebut disertai dengan akhlak yang baik, sebaliknya jika suatu perbuatan tidak dibarengi dengan akhlak, maka perbuatan itu merupakan perbuatan yang hina dan tidak berkualitas, baik menurut manusia apalagi dimata Tuhan Pencipta alam semesta.

Di tengah-tengah masyarakat kita, istilah akhlak kadang-kadang disebut dengan istilah adab. Maka dari itu orang yang baik akhlaknya, biasanya disebut orang yang beradab, sebaliknya orang yang buruk prilakunya, disebut tidak beradab. Selain istilah adab ini, istilah sopan santun juga sering kita temui. Jika ada sekelompok masyarakat yang dapat hidup rukun, giat bekerja dengan cara-cara yang baik, masyarakat

²³HR. Ahmad bin Hambal 2/381

yang demikian ini lalu disebut dengan masyarakat yang santun atau yang mempunyai sopan santun (*civil society*). Secara sederhana bisa kita pahami, bahwa akhlak yang baik, setidaknya harus mengandung dua hal; pertama harus baik niat dan tujuannya, dan kedua harus baik dan benar prosesnya, sehingga output-nya adalah sesuatu yang baik dan benar pula agar bermanfaat bagi sesama. Dua hal inilah yang menjadi ukuran baik atau tidaknya akhlak seseorang.

Ketidaktahuan atau kekaburan terhadap dua hal ini, menyebabkan kita menjadi salah dalam memahami apa maksud dengan akhlak ini. Misalnya, ingin menyantuni anak yatim, membantu fakir-miskin, atau memberi nafkah keluarga, memberi sumbangan pada masjid atau madrasah, semua ini jelas merupakan tujuan yang baik. Tetapi jika tujuan baik ini diwujudkan dengan cara-cara yang salah, seperti: bermain judi, mencuri, korupsi, menipu, dan sebagainya, tentu semua ini tidak bisa disebut perbuatan yang baik atau berakhlak. Ini adalah sebuah contoh dari suatu perbuatan yang tujuannya baik, tetapi cara atau prosesnya salah. Sekali lagi, yang demikian ini, tidak bisa disebut perbuatan yang berakhlak. Contoh yang lain, misalnya, orang yang selalu giat bekerja, selalu jujur, tidak pernah mencuri, tetapi jika tujuan bekerja ini ternyata tidak baik, misalnya: untuk pesta miras, pesta narkoba dan lainnya, jelas semua ini juga salah dan tidak bisa disebut berakhlak. Begitulah, tujuan dan proses, keduanya menjadi kriteria akhlak kita, sekaligus sebagai ukuran kualitas usaha kita. Sebagaimana Nabi telah menjelaskannya:

انما الأعمال با لنيات وانما لكل امرئ ما نوى

*“Sesungguhnya amal itu dengan niat, dan bagi setiap amal manusia tergantung pada apa yang diniatkan.”*²⁴

Berdasarkan hadits ini, menata tujuan sebelum berbuat

²⁴HR. Bukhari, no. 1 dan Muslim, no. 1907

merupakan hal yang penting. Karena kualitas amal-usaha kita sangat tergantung dengan apa yang kita niatkan atau tergantung dengan tujuan kita. Dengan kata lain, tujuan merupakan ukuran berakhlak atau tidaknya seseorang, malah menjadi ukuran diterima atau/tidak amal kita. Mengerjakan shalat misalnya, membayar zakat atau pergi haji, jelas ini baik, tetapi jika dikerjakan dengan tujuan pamer, kepingin dipuji orang, hal ini namanya riya' dan riya' termasuk perbuatan syirik, meski namanya syirik khofi. Maka dari itu perbuatan yang demikian ini, tidak hanya jelek menurut manusia, tetapi juga menjadikan amal kita tidak diterima, malah menjadi berdosa. Sebagaimana telah kita sampaikan di atas, bahwa tujuan baik saja, masih belum cukup, tetapi juga harus melalui proses dan cara-cara yang baik juga. Karena kualitas amal kita juga sangat tergantung dengan prosesnya sebagaimana Firman Allah:

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya” (Qs An-Najm, 53: 39). Dan juga firman Allah “Bagaimanakah nanti apabila mereka Kami kumpulkan di hari (kiamat) yang tidak ada keraguan tentang adanya. Dan disempurnakan kepada tiap-tiap diri balasan apa yang diusahakannya sedang mereka tidak dianiaya (dirugikan)” (Qs Ali imran, 3: 25).

Ayat ini menunjukkan bahwa manusia akan mendapatkan balasan dari apa yang mereka usahakan di dunia. Akan berbeda antara orang yang menggunakan cara-cara yang halal, dengan orang yang menggunakan cara-cara yang haram, hasilnya adalah merupakan balasan bagi perbuatan masing-masing. Demikian juga cara-cara yang sportif dan jujur, tentu tidak sama dengan perbuatan yang penuh dengan tipu muslihat.

Pemahaman etika dan akhlak adalah masalah yang sangat penting untuk dikaji, terlebih di era sekarang dimana dunia politik praktis kerap terjadi perbuatan atau tindakan yang mempertontonkan

konflik kepentingan diantara kubu-kubu yang berseberangan dalam orientasinya di dunia politik. Masing-masing merasa benar atau melakukan pembenaran, peristiwa ini akhirnya menjadi tontonan oleh rakyat di mana persoalan mana yang benar dan mana yang salah, telah kabur atau dikaburkan. Maling berteriak maling, orang yang biasa korupsi malah bicara paling keras akan berantas korupsi. Hampir semua lembaga negara sudah ada perwakilannya dari pejabat tinggi yang menjadi tersangka kasus korupsi. Pada zaman seperti ini, kita terkadang kesulitan membedakan mana orang yang berakhlak dan mana orang yang sejatinya merusak akhlak. Jika memang demikian keadaannya, berarti kita sekarang hidup di tengah-tengah bangsa yang jauh dari akhlak. Peraturan dan Undang-undang dibuat, tidak untuk dijalankan, tetapi kadang untuk disiasati demi kepentingan politik tertentu.

Kerusakan akhlak atau krisis etika, memang sudah sedemikian parah di negeri ini. Perbuatan yang menunjukkan akhlak atau etika yang rendah sudah semakin berani tampil ke muka publik, sehingga bisa dikatakan urat malunya sudah putus. Mulai dari tindakan korupsi para pejabat yang tidak habis-habisnya karena selalu saja muncul kasus baru, perbuatan asusila yang merajalela apalagi yang kalau yang melalukan adalah publik figur. Suap-menyuap sudah terjadi secara sistematis, terstruktur dan masif mulai dari kalangan rakyat biasa sampai pejabat tinggi di negeri ini. Dengan ukuran akhlak, kita juga tidak akan bisa dipaksa-paksa, meski dalam keadaan terdesak. Bagi kita, sudah jelas bahwa akhlak menuntut adanya sikap atau perbuatan yang baik dalam hal ini, yaitu tujuan dan prosesnya. Tujuan baik harus diwujudkan dengan cara-cara yang baik, begitu juga cara-cara yang baik harus dengan tujuan yang baik.

Kita semua sudah tentu mendambakan masyarakat kita ini

menjadi masyarakat yang berakhlak, mendambakan menjadi bangsa yang santun dan beradab. Masyarakat dan bangsa yang demikian ini, jelas tidak mungkin dibangun dengan cara-cara yang tidak baik, karena semata-mata kepentingan hawa nafsu kekuasaan yang penuh dengan tipu muslihat dan ketidakjujuran. Jika hal ini semakin menjadi di bumi khususnya di negeri kita yang tercinta ini, maka bisa diprediksi bagaimana nasib bangsa dimasa depan. Berdasarkan Kalam Ilahi bumi ini hanya diwariskan kepada orang yang berperilaku baik atau sholeh, seperti yang dikatakan dalam Kalam Illahi: "Telah Kami tulis di kitab Zabur setelah Kami tulis pada laukh Makhfud, bahwa bumi ini hanya diwariskan kepada hamba-Ku yang sholeh" (Qs Al-Anbiya, 21: 105).

Bumi akan selamat, sejahtera dan damai dengan tegaknya keadilan di seluruh negeri bila karakteristik orang sholeh tersebut yang berkuasa di bumi ini. Orang yang shaleh adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari penghabisan, dasarnya adalah keimanan yang karena keyakinannya kepada Tuhan membuat segala aktivitasnya berdasarkan pantauan Tuhan walalupun dia tidak melihatnya secara indrawi, sehingga niatpun sudah tertuju karena sebuah pengabdian kepada Tuhan. Lalu meyakini hari akhir bisa menjadi kontrol diri dalam melaksanakan aktivitas di dunia, bahwa apapun, dimanapun kita beraktivitas pasti ada akhirnya, ada waktu penghabisannya, sehingga waktu yang diberikan harus bermanfaat, efektif dan efisien dalam beribadah. Jangan sampai lupa diri hanya melakukan niat sampai tindakan jahat dan akhirnya justru kehabisan waktu sedangkan jalannya sudah menyimpang dari jalan yang lurus sehingga menjadi penyesalan yang tidak berguna.¹⁵ Tujuan hidupnya adalah menyuruh kepada kebaikan (ma'ruf) dan otomatis harus dapat mencegah dari sesuatu yang buruk (munkar) serta selalu bersegera dalam mengerjakan berbagai kebajikan. Dengan ukuran keshalihan tersebut pastilah

terwujud sebuah tatanan Qs, Fathir, 35/37: "Dan mereka berteriak di dalam neraka itu: "Ya Tuhan kami, keluarkanlah kami niscaya kami akan mengerjakan amal yang shaleh berlainan dengan yang telah kami kerjakan". Dan apakah Kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir bagi orang yang mau berpikir, dan (apakah tidak) datang kepada kamu pemberi peringatan?maka rasakanlah (adzab Kami) dan tidak ada bagi orang-orang yang dzalim seorang penolongpun".hidup yang harmonis, aman, penuh dengan keselamatan, kedamaian dan pastinya tegaknya keadilan di dunia.

2 Etika Komunikasi Politik

Etika (*ethics*) adalah bagaimana cara memandang atau persepsi akan benar atau salahnya suatu tindakan atau perilaku. Etika adalah merupakan suatu tipe pembuatan keputusan yang bersifat moral (Englehardt, 2001), dan menentukan apa yang benar atau salah dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang ada dalam masyarakat. Kita mulai bertanya mengapa kita perlu memahami etika, kemudian menjelaskan hubungan etika dengan masyarakat.

Mengapa mempelajari etika? Jawaban terhadap pertanyaan ini mungkin dapat berupa pertanyaan lain: mengapa tidak mempelajarinya? Etika melampaui segala cara kehidupan dan melampaui gender, ras, kelas sosial, identitas seksual, agama dan kepercayaan. Dengan kata lain, kita tidak dapat menghindari prinsip-prinsip etis dalam kehidupan kita. Donald Wright (1996) berpendapat bahwa etika merupakan bagian dari perkembangan umat manusia, dan seiring dengan bertambahnya usia kita, kode moral kita juga mengalami perubahan menuju kedewasaan. Elaine Englehardt (2001) mengamati

bahwa “kita tidak menciptakan sistem etika kita sendiri”,²⁵ yang berarti bahwa kita biasanya mengikuti kode budaya dan moralitas. Dari sudut pandang komunikasi, isu-isu mengenai etika muncul ke permukaan setiap kali pesan-pesan memiliki kemungkinan untuk mempengaruhi orang lain.

Komunikasi merupakan proses sosial di mana individu-individu menggunakan simbol-simbol untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dalam lingkungan mereka. Lima (5) istilah kunci dalam perspektif komunikasi yaitu: sosial, proses, simbol, makna dan lingkungan.

- a) Komunikasi secara sosial (*social*), adalah komunikasi selalu melibatkan manusia serta interaksi. Artinya, komunikasi selalu melibatkan dua orang, pengirim dan penerima. Ketika komunikasi dipandang secara sosial, komunikasi selalu melibatkan dua orang yang berinteraksi dengan berbagai niat, motivasi dan kemampuan.
- b) Komunikasi sebagai proses (*process*), hal ini berarti komunikasi bersifat kesinambungan dan tidak memiliki akhir. Komunikasi juga dinamis, kompleks, dan senantiasa berubah. Selain itu, karena komunikasi merupakan proses, banyak sekali yang dapat terjadi dari awal hingga akhir dari sebuah proses pembicaraan. Orang-orang dapat memiliki sikap yang sama sekali berbeda ketika sebuah diskusi dimulai. Komunikasi sebagai simbol (*symbol*) adalah sebuah label arbitrer atau representasi dari fenomena. Kata simbol adalah simbol untuk konsep dan benda, misalnya; kata cinta

²⁵Richard West & Lynn HLM. Turner, *Pengantar Teori Komunikasi: Analisis dan Aplikasi (Introducing Communication Theory: Analysis and Application)*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2008), hlm. 2

merepresentasikan sebuah ide mengenai cinta; kata kursi merepresentasikan benda yang kita duduki. Label dapat bersifat ambigu, dapat berupa verbal dan nonverbal, dan dapat terjadi dalam komunikasi tatap muka dan komunikasi dengan menggunakan media. Simbol juga terdiri dari dua jenis; (1) Simbol konkret (*concrete symbols*); simbol yang merepresentasikan benda atau sebuah objek; (2) simbol abstrak (*abstract symbols*); simbol yang merepresentasikan sebuah ide atau pemikiran.

3. Makna juga memegang peranan penting dalam definisi komunikasi. Makna adalah yang diambil orang dari suatu pesan. Dalam episode-episode komunikasi, pesan dapat memiliki lebih dari satu makna dan bahkan berlapis-lapis makna. Judith Martin dan Tom Nakayama (2002) menyatakan bahwa makna memiliki konsekuensi budaya. Contohnya; Orang Amerika pada umumnya tidak menyukai hari Senin, hari pertama dalam satu minggu, dan menyukai hari Jumat. Martin dan Nakayama menegaskan bahwa ungkapan seperti TGIF (*Thanks God It's Friday-Syukurlah Ini Hari Jumat*), tidak akan mengomunikasikan makna yang sama pada semua orang, seperti hal yang sama dengan OMG (*O My God*).
4. Lingkungan (*environment*) adalah situasi atau kondisi di mana komunikasi itu terjadi. Lingkungan terdiri dari beberapa lemen seperti; waktu, tempat, periode sejarah, relasi, dan latar belakang budaya pembicara dan pendengar. Lingkungan juga dapat dihubungkan. Maksudnya, komunikasi dapat terjadi dengan adanya bantuan dari teknologi. Misalnya; komunikasi yang difasilitasi oleh media seperti; *email, facebook, chat room* atau

internet.

Maka dari ilustrasi yang telah dijabarkan sebelumnya, selanjutnya penulis akan membahas mengenai etika dalam komunikasi politik. Etika akan di analisis mulai dari perspektif komunikator, pesan, saluran dan komunikan, efek, umpan balik berikut gangguan (*noise*) dari proses komunikasi yang dapat mendeskripsikan mengenai etika dalam berkomunikasi di ranah politik. Dalam pemahaman ini penulis juga menggunakan model untuk lebih memahami, komunikasi sebagai aksi, Interaksi, dan Transaksi dalam proses komunikasi politik. Teoritikus komunikasi menciptakan model-model (*models*), atau representasi sederhana dari hubungan-hubungan kompleks di antara elemen-elemen dalam proses komunikasi, yang mempermudah kita untuk memahami proses yang rumit.

Dalam membahas etika dalam komunikasi politik maka kajiannya pun akan melihat dari lima komponen dari proses komunikasi yang terjadi, mulai dari komunikator, pesan, saluran, komunikan dan efek serta umpan baliknya (*feedback*). Kaitan etika antar komponen ternyata ada *noise* yang sengaja dilakukan. Tidak ada permasalahan etika yang tidak disengaja terjadi. Mulai dari pejabat korupsi, gratifitasi, skandal, perceraian, permufakatan jahat, kasus rumah tangga dan masalah kasus-kasus asusila yang pernah terangkat di media massa dan media sosial. Begitu pun konflik kepentingan yang terjadi di elit politik, sehingga memperkuat sebuah argument bahwa, tidak ada teman dan musuh yang abadi selain kepentingan yang abadi. Akhirnya akan berdampak terhadap makna dari nilai-nilai kesetiaan, loyalitas, dan keteguhan pendirian (*istiqamah*) dalam dunia politik. Proses komunikasi politik juga akan memberikan sebuah gambaran apa yang diperjuangkan para elite, apakah mereka memperjuangkan kepentingan rakyat atau hanya kepada kepentingan golongan dan nafsu

politiknya saja (individual).

Maka komunikasi politik harus dilakukan dengan baik dan benar maksudnya sesuatu yang natural, tulus apa adanya agar dapat dipahami dan dimengerti oleh semua kalangan. Memang tidak dipungkiri mengkomunikasikan masalah politik pasti juga berkaitan dengan suatu setting situasi atau dikenal dengan istilah pencitraan sehingga akan sulit membedakan kemurnian dan kepasluhan (*psedo/semu*) niat politiknya. Substansi komunikasi politik adalah masalah bagaimana cara mengkomunikasikan masalah politik oleh para aktor-aktor (komunikator politik) yang menjadi penentu arah kebijakan dari kewenangan para pemegang kekuasaan, tentunya adalah demi mewujudkan tujuan politik yaitu kesejahteraan rakyat. Memperbaiki komunikasi politik menjadi lebih baik harus berawal dari memahami etika dalam berkomunikasi politik.

Etika juga dijadikan sebagai standar moral yang mengatur perilaku manusia, dan merupakan dialetika antara kebebasan dan tanggung jawab, antara tujuan yang hendak dicapai dan cara untuk mencapai tujuan itu, antara yang baik dan yang buruk, antara yang pantas dan yang tidak pantas, antara yang berguna dan yang tidak berguna, dan antara yang harus dilakukan dengan yang tidak boleh dilakukan.

Dalam konteks komunikasi di masyarakat, etika merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Etika diartikan sebagai: (1) himpunan asas-asas nilai atau moral; (2) kumpulan asas/nilai yang berkenaan dengan akhlak; (3) nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat; (4) norma, nilai, kaidah, atau ukuran tingkah laku yang baik.²⁶Etika, meski menyangkut persoalan tata susila, tetapi tidak membuat seseorang menjadi baik.Etika hanya menunjukkan baik

²⁶Lg Wursanto, *Etika Komunikasi Kantor* (Jogjakarta: Kanisius, 1987), hlm. 27.

buruknya perbuatan seseorang. Etika hanya berfungsi sebagai pedoman, yaitu turut mempengaruhi seseorang untuk berperilaku baik, melakukan kewajiban sebagaimana mestinya dan menjauhi larangan sebagaimana mestinya. Ketika etika dikaitkan dengan komunikasi, maka etika itu menjadi dasar pijakan dalam berkomunikasi antar individu atau kelompok.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid yang dikutip oleh A. Muis pernah menyatakan keinginannya agar para elite politik menggunakan (bahasa) komunikasi politik yang santun. Seperti apa komunikasi politik yang santun itu, tidak di elaborasi oleh presiden. Tetapi dapat dibuat tafsiran bahwa maknanya tak jauh dari makna bersikap sopan santun dalam membuat pernyataan atau isu-isu yang berimplikasi politik (*fatsoenlijk politieke gedrag*). Seterusnya pengertian tersebut tidak dapat tidak, berimplikasi etika (komunikasi) politik.²⁷

Masalahnya, sejauhmana etika komunikasi dapat berperan untuk menjadi rambu bagi (komunikasi) politik? Masalah itu muncul karena etika dan politik adalah dua dunia yang berbeda dan karena itu tidak mudah menyatukan keduanya. Politik seperti dinyatakan mestinya dipatuhi dalam mewujudkan kemerdekaan berbeda pendapat? Komitmen moral dan etika ratusan ribu pengunjuk rasa itu bisa menipis karena pengaruh psikologi massa (kesadaran "aku" seketika lenyap di dalam kesadaran "kita"). Mau tak mau perilaku destruktif mudah muncul dan sulit dikontrol oleh etika. Barulah etika bisa berperan jika ada kekuatan lain yang melakukan intervensi. Di dalam hal seperti itulah eksistensi alat kekuasaan negara merupakan sebuah alasan pembenar.

Menurut Dedi Irawan ada empat nilai partisipasi politik yang

²⁷A. Muis, *Komunikasi Islam*, Cet. 1 (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001), hlm. 117

akan menambah bobot dalam partisipasi politik, yaitu :²⁸

1. Tingkat Inisiatif

Inisiatif ini diartikan sebagai kesadaran dari individu atau kelompok untuk melakukan sendiri kegiatan partisipasi politik tanpa adanya faktor dari kelompok lain (misalnya, tekanan, pengaruh atau paksaan)

2. Toleransi Terhadap Perbedaan Pendapat

Cerminan dari kehidupan demokrasi adalah sikap yang toleran terhadap segala perbedaan yang ada di lingkungan politiknya. Ada kecenderungan dalam masa transisi politik, sikap toleransi adalah sikap yang sulit untuk dijalankan.

3. Tingkat Kebersamaan (Konsensus)

Konsensus adalah nilai partisipasi yang membutuhkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan politik yang timbul. Seperti halnya toleransi terhadap perbedaan, maka konsensus juga sulit dilaksanakan dalam masa transisi politik.

4. Tingkat Keberhasilan (*Output*)

Nilai ini adalah akhir dari suatu proses partisipasi. Besarnya keberhasilan partisipan amat ditentukan dalam berbagai hal, termasuk di antaranya adalah bagaimana intensitas partisipasi yang dijalankan.

Kalangan dari parpol memiliki peluang besar untuk menjadi pimpinan di Aceh, terutama masa transisi ini. Sebab parpol memiliki struktur dan jaringan yang kuat. Di Aceh banyak parpol yang menempatkan kader-kadernya dalam struktur yang signifikan. Artinya secara struktur kelompok ini lebih mapan.

²⁸Dedi Irawan, *Modul Materi Kuliah Teori Perbandingan Politik*, 2005, hlm. 201

Parpol juga memiliki jaringan organisasi yang kuat sampai ke *grass root*. Minimal secara kepengurusan, parpol memiliki jaringan sampai ke kecamatan. Bahkan ada yang memiliki struktur sampai ke desa. Sehingga dalam setiap hajatan politik seperti pemilu, parpol lebih siap dibandingkan dengan kelompok lain.

Respon masyarakat terhadap keberadaan parpol juga tinggi. Ini dilihat dari tingginya animo masyarakat Aceh dalam partisipasi mengikuti pemilu. Dapat disimpulkan bahwa dalam rakyat masih memiliki kepercayaan kepada parpol.

Dua elemen inilah yang memiliki peluang besar ke depan untuk memimpin masyarakat Aceh ke depan. Walaupun masih ada elemen-elemen lain yang juga memiliki kesempatan yang sama, seperti kalangan ulama, cendekiawan, kelompok sipil dan juga kelompok pragmatis yang dekat dengan status quo, walau kelompok ini susah dideteksi indentitasnya dan juga kelompok sipil. Akan tetapi peluang kelompok eks GAM dan parpol lebih besar. Apalagi proses pemilihan pemimpin kedepan akan lebih demokratis karena akan melibatkan peran serta rakyat secara lebih rill, yaitu dengan diperbolehkannya mendirikan partai lokal dalam pilkada di Aceh kali ini.

C. Etika Komunikasi Politik Ulama *Dayah* Tradisional Aceh Di Kabupaten Bireuen

Etika merupakan pencerminan dari pandangan masyarakat mengenai apa yang baik dan apa yang buruk, sekaligus menjadi indikator untuk membedakan antara sikap dan perilaku yang dapat diterima dan ditolak dengan tujuan untuk mencapai kebaikan dalam hidup bersama. Karena etika itu merupakan nilai baik dan buruk yang disepakati oleh kelompok masyarakat tertentu, maka norma etika tentang sesuatu bisa berbeda di antara satu golongan masyarakat

dengan golongan masyarakat yang lain.

Pengaruh keberadaan ulama terhadap agama di tengah-tengah masyarakat, terwujudnya unsur kharisma yang melekat pada ulama *dayah*. Kharisma itu yang merupakan kesan daripada karamah dan barakah yang mereka miliki, yang terpancar dari keilmuan mereka. Dalam konteks ini dapat diperhatikan pada sosok Abu Ibrahim Bardan yang secara keilmuan berada jauh di atas ulama *dayah* lainnya. Ketika memberi arahan membuat organisasi ulama *dayah* (HUDA) maka ulama dan masyarakat secara tulus memberi sokongan. Garis Politik ulama *dayah* meninggalkan suatu yang berpotensi kefasikan, walaupun menghasilkan kemaslahatan.²⁹

Prinsip ikhlas adalah prinsip paling mendasar dalam komunikasi Islam. Kehilangan prinsip ini dari komunikator maupun komunikan akan membuat tujuan utama komunikasi yaitu ibadah menjadi hilang dan kekuatan pesan yang disampaikan memudar. Kehilangan prinsip ini dari salah satu pihak akan membuat proses komunikasi terhambat apalagi bertemu antara ketidak-ikhlasan komunikator dengan komunikan. Prinsip ini membuat setiap pesan atau pernyataan yang keluar itu mengandung konsekuensi pahala atau dosa. Lisan memiliki peran kunci dalam berkomunikasi. Maka komunikasi politik ulama *dayah* senantiasa berada pada langkah-langkah berikut: (1) Islam melarang berkata kotor dan kasar; (2) memberikan motivasi agar selalu berkata baik. Konsep-konsep seperti inilah ulama lakukan ketika berhadapan dengan masyarakat.³⁰

Tu Sop Jeunieb dalam hal ini sering mengumandang dalam kampanyenya. Beliau menamakan upaya ini dengan "arus

²⁹Tgk. Ihsan, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 13 Agustus 2018., Tgk. HLM. M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018. dan Tgk. Muntasir, Wawancara di Samalanga., 10 Mei 2018

³⁰Tgk. HLM. Ruslan, wawancara di Bireuen, Tanggal 29 Mei 2018.

kebaikan". Artinya berpolitik itu harus ditempuh dengan kegiatan yang baik. Politik pada dasarnya tidak buruk, akan tetapi pelaku politiklah yang membuat politik menjadi "tidak sehat". Sebagai masyarakat yang beragama kita diwajibkan mengikuti anjuran agama untuk selalu berbuat yang baik, termasuk dalam aktivitas politik. Pesan politik Tu Sop disampaikan untuk semua orang tanpa membedakan pihak tertentu. Artinya menghindari menyebut-nyebut keburukan pihak manapun.³¹

Mengacu pada konsep komunikasi Islam, ulama *dayah* sangat menekankan prinsip kebersihan dalam segala hal, termasuk dalam menyampaikan pesan politik. Pesan politik yang baik akan mendatangkan kenyamanan psikologis bagi yang menerimanya, sedangkan pesan-pesan sarkastis, jorok, berdarah-darah, pertengkaran, dan sejenisnya akan berdampak pada keruhnya hati. Ketenangan tersebut tidak hanya bagi diri ulama *dayah* selaku komunikator politik, tetapi juga berdampak baik kepada komunikan, dalam hal ini masyarakat umum dan politikus lain. Misal Tu Sop Jeunieb, dalam setiap pertemuan, beliau selalu menekankan untuk tidak menjelek-jelekkkan kelompok lain dan selalu menghindari bentrok secara lisan, apalagi secara fisik.³²

Pesan positif sangat berpengaruh bagi kebahagiaan seseorang dalam kondisi apapun dia berada. Seorang komunikator yang sering mengirim pesan positif kepada komunikan akan menyimpan modal yang banyak untuk membuat yang positif. Ulama *dayah* di Aceh sebagai pelayan agama dalam konteks menjadi ujung tombak dalam mempertahankan agama. Sebagai pribadi, ulama mampu menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat, dan secara kolektif

³¹Tgk. HLM.M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018.

³²*Ibid.*

ulama menjadi rujukan memberikan pandangan ketika ada permasalahan di masyarakat. Contoh masalah ibadah *furu'iyah*. Masyarakat yang memiliki persepsi-persepsi berbeda dalam amalan-amalan, maka kelompok ulamalah yang memberi fatwa.³³

Masyarakat Aceh adalah masyarakat yang sangat fanatik terhadap agama, pemahaman-pemahaman yang diberikan para ulama *dayah* dapat memberikan solusi yang berkaitan dengan keyakinan, maupun pengamalan. Ulama *dayah* juga membina hubungan dengan masyarakat, tidak mau benturan di dalam konflik sosial. Sikap politik ulama secara etika memakai *ahlussunnah waljamaah*.³⁴

Etika para ulama selalu berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis Rasul merupakan hal pokok dalam ajaran agama Islam. Keduanya merupakan hal sentral yang menjadi "jantung umat Islam" karena seluruh bangunan doktrin dan sumber keilmuan Islam terinspirasi dari dua hal pokok tersebut, oleh karena sangat wajar dan logis bila perhatian dan apresiasi terhadap kedua melebihi perhatian dan apresiasi terhadap bidang yang lain. Prinsip-prinsip inilah para ulama *dayah* dalam menyampaikan sesuatu kepada masyarakat agar terbentuk komunikasi Islami.

Berbicara dengan data dan informasi akurat adalah salah satu ciri pribadi berkualitas. Selain menambah kredibilitas, informasi yang akurat menghindarkan kita jatuh kepada kesalahan yang berujung kepada penyesalan. Prinsip selektivitas dan validitas dalam komunikasi Islam bukan hanya bertujuan untuk memberikan kepuasan bagi komunikan di dunia ini, tetapi tujuan utama mereka adalah agar bisa

³³Tgk. Nurdin, Wawancara di Lhokseumawe, Tanggal 21 Agustus 2018., Tgk. HLM. M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018. dan Tgk. Muntasir, Wawancara di Samalanga., 10 Mei 2018

³⁴Tgk. Razali, Wawancara di Bireuen. Tanggal 11 Juli 2018., Tgk. HLM. M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018. dan Tgk. Muntasir, Wawancara di Samalanga., 10 Mei 2018

mempertanggungjawabkan apa yang mereka kemukakan pada saat diminta pertanggungjawabannya di akhirat.³⁵

Komunikasi antar manusia merupakan aktivitas menyampaikan dan menerima pesan dari dan kepada orang lain. Saat berlangsung komunikasi, proses pengaruh mempengaruhi terjadi. Di samping itu, komunikasi juga bertujuan untuk saling mengenal, berhubungan, bermain, saling membantu, berbagi informasi, mengembangkan gagasan, memecahkan masalah, meningkatkan produktivitas, membangkitkan semangat kerja, meyakinkan, menghibur, mengukuhkan status, membius, dan menciptakan rasa persatuan. Di samping tujuan baik tersebut, komunikasi juga dapat dipakai untuk saling mendomba, melemahkan semangat, meruntuhkan status, membuat orang sedih, dan membuat orang terjerumus ke dunia hitam.

Ulama selalu menanamkan aqidah yang kokoh, bila aqidah sudah benar dan kuat maka Islam akan benar dan kuat. Pendidikan menjadi pelajaran pokok, ulama memiliki kewajiban mengajarkan ilmu tentang syariat kepada masyarakat. Melakukan pencegahan dengan menanamkan aqidah dan memberikan ilmu kepada masyarakat lebih cepat menghadirkan kesadaran masyarakat untuk menghindari kerusakan dan larangan-larangan agama.³⁶

Kalau kita melihat dedikasi para ulama, cara menyampaikannya menyejukkan tapi kita sangat heran kenapa ketika ulama berpolitik sedikit sekali yang muncul (menang), kalau masalah ketenaran para ulama lebih tenar, sebab tiap berdakwah minimal 2 x sebulan, bukan waktu tahun-tahun politik, contoh setiap Jum'at, majelis *ta'lim* mengajar

³⁵Tgk. HLM.M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018.

³⁶Tgk. Razali, Wawancara di Bireuen. Tanggal 11 Juli 2018., Tgk. HLM. M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018. dan Tgk. Muntasir, Wawancara di Samalanga., 10 Mei 2018

di *dayah-dayah*.³⁷

Menelusuri penyebab ulama *dayah* sekarang ini mulai memudar peranannya dalam politik, seperti terbentuk undang-undang No. 44 tahun 1999 tentang keterlibatan ulama *dayah* dimarjinalkan dalam peranan-peranan yang dilakukan oleh eksekutif-eksekutif dan yudikatif. Dalam hal ini ulama *dayah* tidak dilibatkan ketika penyusunan qanun syariat dalam bentuk hukum materil dan hukum formil. Di sini pula peranan ulama *dayah* menjadi lemah dan tidak berdaya yang beranggapan ulama *dayah* tidak mempunyai kapasitas menyusun draf qanun, alasannya ulama *dayah* tidak memiliki kapabilitas akademik. Dengan mempublikasi-kan unsur-unsur di atas oleh pejabat negara dalam hal ini termasuk di dalamnya tokoh-tokoh politik, ini yang harus dipikirkan oleh ulama *dayah*.³⁸

Di antara fungsi penting komunikasi Islam fungsi meyakinkan. Fungsi meyakinkan artinya membuat ide, pendapat, dan gagasan yang kita miliki bisa diterima oleh orang lain dengan senang hati dan tidak terpaksa. Bahkan bukan sekedar menerima dengan sukarela mereka yang merasa mantap dengan penjelasan tersebut bisa menjadi pendukung ide itu.

Ulama *dayah* berupaya meyakinkan dengan metode dialog, debat, dan audiensi. Dialog dilakukan dengan suasana santai, saling mengemukakan pendapat dengan tenang mungkin di dalamnya juga terjadi tarik ulur dan akhirnya berujung kepada suatu kesepakatan mendukung ide bersama atau salah satu ide yang lebih baik. Adapun debat biasanya lebih seru, kadang-kadang sampai panas dan masing-masing ngotot dengan pendapatnya. Menggunakan fungsi ini untuk meyakinkan orang agar menerima nilai-nilai kebenaran adalah sangat

³⁷Tgk Abdullah, dkk, wawancara di Bireuen Tanggal 24 Agustus 2018.,

³⁸Tgk. HLM.Ruslan, wawancara di Bireuen, Tanggal 29 Mei 2018.

penting.³⁹

Ada empat fokus utama aktivitas komunikasi politik ulama *dayah*, yaitu : (1) Membimbing orang untuk melakukan perbuatan baik, dan menangkal mereka untuk melakukan perbuatan negatif; (2) memperbaiki atau memulihkan kondisi mereka yang sudah rusak; (3) mengarahkan orang untuk menemukan potensial yang mereka miliki; dan (4) mengembangkan potensi manusia agar lebih maksimal.

Menyampaikan suatu permasalahan baik dalam konteks (politik, agama, dan budaya) para ulama melakukan dengan cerdas dan bijaksana agar masyarakat tidak tersalut dengan emosi. Lemah dalam menyampaikan permasalahan di masyarakat tegas dalam pemerintahan yang dituangkan dalam Undang-Undang Qanun. Orientasi tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan nilai-nilai agama dan budaya. Karena niat beramal, selanjutnya karena di dasari oleh prinsip-prinsip Islam.⁴⁰

Para ulama dalam menyampaikan sesuatu permasalahan, baik dalam masalah agama, budaya, politik, dibincangkan dalam mimbar-mimbar majelis *ta'lim*, majelis budaya agar yang di maksud tercapai. Dalam konteks kekinian ulama selalu menulis dalam bentuk buku maupun buletin-buletin masalah etika para ulama selalu berpegang pada tatanan *akhlakul karimah*. Begitu pula dalam hal berpolitik, kita lihat dalam satu daerah bahkan lingkungan ada perbedaan pemilikan, namun para ulama tidak memberikan penilaian, ataupun melemahkan yang lainnya.⁴¹

³⁹Tgk. Muntasir, Wawancara di Samalanga., 10 Mei 2018.dan Tgk. HLM. M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018. dan

⁴⁰Tgk. HLM.Ruslan, wawancara di Bireuen, Tanggal 29 Mei 2018.

⁴¹Tgk. Ihsan, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 13 Agustus 2018., Tgk. HLM. M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018. dan Tgk. Muntasir, Wawancara di Samalanga., 10 Mei 2018

Dalam menyikapi gonjang-ganjing politik, para ulama dalam hal ini bersikap sabar, walaupun di dalam suatu partai ada terkait beberapa ulama di dalamnya. Merupakan hal yang wajar dalam berpartai politik, perbedaan bukan berarti para ulama pecah, tapi para ulama masih diminati oleh para politikus walaupun hanya sebagai pendamping.⁴²

Sebagai ulama yang sudah menjadi panutan dalam masyarakat Aceh, terutama di wilayah Bireuen, seperti Abu Tu Min, dalam kesehariannya dikenal sebagai ulama *dayah* yang sangat akrab dengan masyarakat. Di samping kesibukannya membimbing dan mengajar santri di *dayah*nya juga menyediakan waktu khusus untuk masyarakat yang meminta petunjuk dalam berbagai persoalan yang dihadapi. Sehingga dalam hari-harinya Abu Tu Min menyediakan waktu khusus untuk masyarakat pada hari Jum'at dan hari Sabtu.

Masyarakat yang datang pada Abu Tu Min umumnya untuk mencari penyelesaian masalah yang mereka hadapi, baik masalah agama, sosial dan masalah kekeluargaan. Semua itu dilayani Abu Tu Min dengan senang hati. Sebagai ulama yang sangat berpengaruh di Aceh Abu TuMin juga memberikan pandangan terhadap Aceh dalam kondisi pasca damai.

D. Kesimpulan

Dari paparan di atas dapat diambil kesimpulan. *Pertama*, Komunikasi politik ulama *dayah* tradisional Aceh di Kabupaten Bireuen, baik berpolitik secara substansial maupun politik praktis, merupakan sosialisasi pendidikan politik Islam terutama tentang kehadiran ulama dalam sistem politik yang saat ini dipertentangkan dan upaya menyuarkan *syari'at* Islam, hak rakyat dan ulama serta

⁴²Tgk. HLM.M. Yusuf, Wawancara di Jeunieb, Tanggal 6 Juli 2018.

eksistensi lembaga pendidikan dayah yang selama ini dimarjinalkan sekaligus memperbaiki lingkungan politik yang "tidak sehat" dan merubah *mindset* masyarakat yang menilai politik sebagai kegiatan sesaat. Dari itu dapat disimpulkan bahwa komunikasi politik ulama tersebut pada hakikatnya merupakan wujud dari dakwah politik. *Kedua*, Etika komunikasi politik ulama dayah tradisional Aceh di kabupaten bireuen dapat dilihat dalam dua sisi baik dan buruk, yaitu: a) Di pandang baik karena komunikasi politik dilakukan dengan mengajak dan mencontohkan praktek politik yang sarat dengan nilai-nilai syari'at dalam rangka memperbaiki iklim politik saat ini sekaligus mampu mempertahankan status keulamaanya dan b) Di anggap tidak baik oleh sebagian masyarakat sebagai akibat muatan dari penggunaan materi agama yang memunculkan kesan bahwa ulama memanfaatkan agama untuk kepentingan politiknyanya semata.

E. Daftar Pustaka

Agus Makmurtono dan Munawir, *Etika (Filsafat Moral)*, Cet. 1, Jakarta: Wira Sari, 1989.

Ahmad al-Imrani, *Majalah Al-Bayan*, Juz. 205, Software al-Maktabah al-Syamilah Ishdar Versi 3.8, 2009..

Aji Sularso, *Profesionalisme Humas dalam Menghadapi Tantangan*, Komunikasi, Vol. 9, No. 2, LIPI Press, 2006.

Alex Sobur, *Paradigma Komunikasi Politik dalam Mewujudkan Masyarakat Madani* (Makalah Juara ke III, LKTI dosen Unisba Tahun Akademik 1999-2000, tidak diterbitkan.

Al-Ghozali, *Ihya' Ulumuddin*, Juz III, Kairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Sirkahu, t.t.

Austin Fagothey, *Ethics in Theory & Practice, from right & reason*, dalam Mudlor Achmad, Drs, *Etika dalam Islam*, Al-Ikhlash, Surabaya.tt.

Barmawei Umary, *Materia Akhlak*, Cet. 11, Solo: Ramadhani, 1993.

Daniel Hutagalung, *Problem Aceh: Menutup Aib dengan Darurat Militer*, dalam Elsam, Vol. II, No. VII, 2003.

Franz Magnis Suseno, *Etika dasar*, Cet. 6, Jakarta: Kanisius, 1993.

Franz Magnis Suseno, *Filsafat Sebagai Ilmu Kritis*, Jakarta: PT. Gramedia, 1993.

Harmonis, *Perbandingan Sistem Komunikasi Politik Presiden Soeharto Dan Soesilo Bambang Yudoyono (SBY)*, dalam *Malaysian Journal of Communication*, Jilid 28 (2), 2013.

Harry Kawilarang, *Aceh dari Sultan Iskandar Muda ke Helsinki*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2008).

Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz. 1*, Software al-Maktabah Al-Syamilah Ishdar Versi 3.8, 2009.

Idham Holik, *"Komunikasi Politik dan Demokratisasi Di Indonesia: Dari Konsolidasi Menuju Pematangan,"* dalam Madani ed. II (Nopember 2005).

K Bertens, *Etika*, Cet. 5, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2000.

M Amin Syukur, *Etika Keilmuan*, Jurnal Theologia, Semarang, Fakultas Ushuludin IAIN Walisongo,

M.J. Langeveld, Dr; *Menuju ke Pemikiran Filsafat*; terj. G.J. Claessen, PT. Pembangunan, Jakarta, cet III, 1959.

Mudlor Ahmad, *Etika dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, tt.

Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Juz 1*, Software al-Maktabah Al-Syamilah Ishdar Versi 3.8, 2009.